

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN
BALE BANDUNG TENTANG DITOLAKNYA
DAKWAAN (*OBSCUURLIBEL*) TERKAIT UNSUR
KESALAHAN IDENTITAS TERDAKWA PENCEMAR
LINGKUNGAN MENURUT PASAL 143 AYAT (3)
KUHP**

Oleh :

**Aries Indra Rochmana
4115 1010 1401 67**

STUDI KASUS

(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***JURISTPRUNDENCE NUMBER 755/PID.B/LH/2019/
BALE BANDUNG COURT AS CLAUSE
INTERPRETATIONS REJECTED PROSECUTED BY
IDENTITY FAULT GUILTY'S FORMED ACCORDING
CRIMINAL JUSTICE PROCESS LAW BOOK ARTICLE
143 NUMBER 3***

By

**Aries Indra Rochmana
4115 1010 1401 67**

A CASE STUDY

***(Asked to Meet one Of the Terms In Order To Get
A Degree Of Law At Law Langlangbuana
Faculty)***



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA***

2020

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aries Indra Rochmana**

NPM : **4115 1010 1401 67**

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Judul :

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN BALE
BANDUNG TENTANG DITOLAKNYA DAKWAAN
(OBSCUURLIBEL) TERKAIT UNSUR KESALAHAN IDENTITAS
TERDAKWA PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT PASAL
143 AYAT (3) KUHAP**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism* , apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikianlah surat pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Wassalam, penulis.

Bandung, Agustus 2020

Aries Indra Rochmana

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi dari batalnya dakwaan jaksa pertama-tama adanya celah hukum dalam sisi penegakan hukum, di lapangan terdapat pembuangan air limbah area PT Yoosung yang disalurkan drainase dan perusahaan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang hal ini menjadi ranah Satgas Citarum Harum, yang melakukan penegakan hukum administrasi secara langsung. Adapun penegakan hukum pidananya akan dilimpahkan pada pihak Kepolisian. Sisi penegakan hukum administratif areal Citarum Harum yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia, yang pada akhirnya dilimpahkan ke pada Pihak Kepolisian, menurut hemat penulis rentan terjadinya *nebis in idem*, dan atau ditolaknya dakwaan jaksa Penuntut Umum. (perkara PT Yoosung yang telah dilakukan penanganan Penegakan Hukum Administratif dan bentuk Penutupan aliran pembuangan air limbah pabrik PT Yoosung yang menuju areal sungai dan atau anak sungai Citarum.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus hukum secara kualitatif deskriptif, tanpa ada angka grafik dan tabel, originalitas dan belum pernah diteliti oleh akademisi lainnya, kasus yang dijadikan sampel merupakan putusan hakim, teknik pengumpulan data menggunakan teknik menyusun data normatif, kemudian mensinkronisasikan dengan realita yang terjadi di lapangan, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu meneliti data yang telah di susun sistematis.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung yang membatalkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memuat banyak aspek hukum, dan mengandung banyak masalah hukum dari sisi struktur Aparat Penegak HUKUM Kepolisian dan Satgas Citarum yang berpengaruh pada efek penegakan hukum formil, pengaruh atau akibat tersebut adalah dibatalkannya dakwaan JPU yang berisi petitum Tindak Pidana Lingkungan Hidup terkait dengan Pasal 88 Undang-undang No 32 2009, bahwa usaha pabrik PT Yoosun telah mencemari lingkungan dengan tidak dilakukannya AMDAL dan penyaringan limbah B3 tersebut, hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup terutama Daerah Aliran Sungai Citarum, Perseroan dan atau personen yang ditunjuk berdasarkan AD/ART wajib mempertanggungjawabkan secara Pidana, namun bentuk penegakan hukum ini memiliki kelemahan dari segi formil menurut Pasal 143 KUHAP, hakim telah salah dalam memutus *obscure libel*, karena adanya kesalahan data identitas yang sifatnya dapat di maklumi disimpulkan pula mengenai Akibat Hukum Kelirunya Dakwaan Jaksa Dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung, putusan sela hakim yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan eksepsi yang tidak logis 156 ayat (1) KUHAP, kekuatan hukum akta pendirian yang belum disahkan di Depkumham pada dasarnya hanya permasalahan administrasi undang-undang Jabatan Notaris. Diperlukan upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali oleh Jaksa demi hukum demi kepentingan keadilan mengingat tindak pidana lingkungan sangat memiliki dampak buruk bagi kelangsungan masyarakat Bandung dan tercipterainya marwah penegakan Hukum.

ABSTRACT

This writing was motivated by the cancellation of the prosecutor's indictment, firstly there was a legal loophole in the law enforcement side, in the field there was a waste water disposal in the area of PT Yoosung which was channeled by drainage and the company carried out B3 waste management without the issuance of permits issued by the authorities. Citarum Harum, which carries out administrative law enforcement directly. The criminal law enforcement will be delegated to the Police. The administrative law enforcement area of the Citarum Harum area is carried out by the Indonesian National Military aparturation, which is ultimately handed over to the Police, according to the opinion of the writer to be vulnerable to nebis in idem, and or to the public prosecutor's indictment is rejected. . (PT Yoosung's case which has been carried out in handling Administrative Law Enforcement and form of Closing the flow of waste water from PT Yoosung's factory to the river area and / or tributaries of the Citarum.

The research method uses a qualitative case-law approach that is descriptive, with no graph and table figures, originality and has never been studied by other academics, the sample case is a judge's decision, the data collection technique uses normative data compilation techniques, then synchronizes with the reality that occurs in the field, the data analysis technique uses descriptive analysis method that is researching data that has been systematically compiled

Legal Considerations in Decision Number 755 / PID.B / LH / 2019 / PN Bandung Bale which canceled the Public Prosecutor's Indictment, contained many legal aspects, and contained many legal issues in terms of the structure of the Law Enforcement Officers of the Police and the Citarum Task Force that affected the enforcement effect. formal law, influence or consequence is the cancellation of the prosecutor's indictment containing the Environmental Crime petition related to Article 88 of Law No. 32 2009, that the business of PT Yoosung factory has polluted the environment by not carrying out the AMDAL and screening of B3 waste, this matter pose a serious threat to the environment, especially the Citarum River Basin, the Company and / or personnel appointed under the Statutes / By-Laws are required to be criminally accountable, but this form of law enforcement has formal weaknesses according to Article 143 of the Criminal Procedure Code, judges have been wrong in deciding obscure libel, due to an error in identity data that can be In understanding, it was concluded that the Legal Impact of the Prosecutor's Indictment in Decision Number 755 / PID.B / LH / 2019 / PN Bale Bandung, interim decision of the judge who stated the indictment was not acceptable (NO) with the consideration of illogical exceptions 156 paragraph (1) KUHAP, the legal strength of the deed of establishment which has not yet been ratified at the Department of Law and Human Rights is basically just an issue of the administration of the Law of Notary Position. An extraordinary remedy is needed, namely an effort to review by prosecutors for the sake of law in the interest of justice, considering that environmental crimes have a devastating effect on the survival of the people of Bandung and the destruction of the law enforcement spirit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr ,wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN BALE BANDUNG TENTANG DITOLAKNYA DAKWAAN (*OBSCUURLIBEL*) TERKAIT UNSUR KESALAHAN IDENTITAS TERDAKWA PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT PASAL 143 AYAT (3) KUHP

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Bapak H. Riyanto, S. Akhmadi, S.H., M.H selaku pembimbing, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H., M. Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung, sekaligus dosen penguji.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung,sekaligus ketua dosen penguji.

5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas LanglangbuanaBandung,
7. Bapak Rachmat Suharmo, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum , dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum LanglangbuanaBandung.
17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih atas dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua dan istri dan tidak lupa Studi Kasus ini saya

persembahkan kepada anak tercinta dan seluruh keluarga besar saya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman yang selalu mendukung selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, Agustus 2020

Penulis,
Aries Indra Rochmana

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI	
A. Permasalahan Hukum.....	9
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Surat Dakwaan	9
2. Penghentian Penuntutan	14
3. Daerah Aliran Sungai Citarum Berdasarkan PP No.15/2018	17
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	20
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A Ringkasan Putusan No 755/PID.B/LH/2019/PN BLBandung	26
B Pertimbangan Hukum Hakim.....	26
BABIV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 755/PID.B/LH/2019/PN BALE BANDUNG TENTANG BATALNYA DAKWAAN JAKSA	

**PENUNTUT UMUM (*OBSCUURLIBEL*) DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN KUHAP.**

- A. **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor
755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung Tentang Batalnya Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Berdasarkan Pasal 143 KUHAP 53**
- B. **Akibat hukum batalnya dakwaan Jaksa dalam Perkara Nomor
755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung perkara Pencemaran
Lingkungan Hidup 60**

BAB V KESIMPULAN

- A KESIMPULAN..... 65**

**DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE
LAMPIRAN**